

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Memasuki era reformasi masyarakat Indonesia mengalami perubahan yang cukup mendasar dan besar. Perubahan tersebut ditandai dengan meningkatnya keinginan akan akuntabilitas dan transparansi kinerja terhadap pengelolaan sektor publik. Perlawanan terhadap budaya manipulasi baru saja dimulai dengan berakhirnya era pemerintahan yang mengutamakan stabilitas. Istilah reformasi ini adalah cetusan untuk mendudukan kembali keseimbangan pembangunan fisik dan pembangunan nilai. Akibatnya, reformasi menjadi lebih menekankan pembangunan nilai yang diungkap dalam *good governance* (Indra 2010; 20). Menurut *World Bank* dalam Mardiasmo (2004; 18) *good governance* sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal and political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha.

Beberapa kali terjadi pernyataan ketidakpuasan oleh masyarakat atas kepemimpinan kepala daerah dalam melakukan kinerjanya sebagai organisasi sektor publik, baik pada manajemen pelayanan publik maupun pada penggunaan anggaran belanja daerah. Seperti yang dikutip dalam (www.dnaberita.com, diakses pada 5 April 2016: 23.00), anggota DPRD menuding kinerja Dinas Tata

Ruang Tata Bangunan Medan sangat buruk, dikarenakan beberapa rekomendasi hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) di komisi DPRD Medan tidak pernah direalisasikan oleh Dinas Tata Ruang Tata Bangunan, beberapa harapan masyarakat yang diwakili oleh DPRD tidak dilaksanakan dengan secara efektif. Keingintahuan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan tentunya tidak hanya dipenuhi dengan informasi keuangan saja, masyarakat tentunya juga ingin mengetahui lebih jauh apakah pemerintah yang dipilihnya telah menjalankan program kerjanya secara ekonomis, efisien dan efektif, dikatakan efisien dan efektif apabila keberadaan sektor publik mampu memberikan pelayanan kepada warganya secara murah, mudah, dan terjangkau sehingga mampu memperbaiki kesejahteraan warganya (Dwiyanto, 2002; 2003; & 2007; dalam Agus 2010 : 152).

Akuntabilitas publik merupakan kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*)/pemerintah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) / masyarakat yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo, 2002:20), akuntabilitas publik adalah pemberian informasi kepada publik dan konstituen lainnya yang menjadi pemangku kepentingan (*stakeholder*) (Mahmudi, 2007: 9). Akuntabilitas bukan hanya sekedar menunjukkan uang publik dibelanjakan untuk berbagai keperluan publik, akan tetapi juga menunjukan uang publik tersebut dipergunakan secara ekonomis, efektif, dan efisien.

Kinerja suatu organisasi sektor publik dapat dikatakan baik jika organisasi tersebut mampu menjalankan tugas-tugas dalam memenuhi tujuan yang telah ditetapkan organisasi dengan hasil *outcome* yang tinggi dengan biaya yang rendah. Kinerja organisasi sektor publik sendiri berbeda dengan sektor swasta yang hanya melihat dari aspek keuangan, organisasi sektor publik bersifat multidimensional, sehingga tidak ada indikator tunggal yang dapat menilai kinerja, karena sifat output yang dihasilkan sektor publik lebih banyak bersifat *intangible output*, maka perlukan metode untuk mengukur kinerja non keuangan, pengukuran kinerja non keuangan tersebut untuk menilai apakah program atau kegiatan yang ditelaah dijalankan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana awal, dan berjalan secara efisien, untuk dapat mengukur kinerja keuangan dan non keuangan pada organisasi sektor publik tersebut, dapat menggunakan metode *value for money* yang merupakan metode pengelolaan yang berdasarkan pada tiga indikator utama yaitu ekonomis, efisiensi dan efektivitas.

Menurut Mardiasmo (2002: 4) *value for money* merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang berdasarkan pada tiga elemen utama, yaitu ekonomis, efisiensi, dan efektivitas. Ekonomis merupakan pemerolehan *input* dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada harga yang terendah. ekonomis dihasilkan perbandingan *input* dengan *input value* yang dinyatakan dalam satuan moneter. Efisiensi merupakan pencapaian *output* yang maksimum dengan *input* tertentu untuk penggunaan *input* yang terendah untuk mencapai *output* tertentu, efisiensi dihasilkan dari perbandingan *output/input* yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan, efektivitas merupakan tingkat

pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Secara sederhana efektivitas dihasilkan dari perbandingan *outcome* dengan *output*, dengan tujuan yang didapat dengan metode *Value for Money*, yaitu: ekonomis (hemat cermat) dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, efisien (berdaya guna) dalam penggunaan sumber daya dalam arti penggunaannya diminimalkan dan hasilnya dimaksimalkan, serta efektif (berhasil guna) dalam arti mencapai tujuan dan sasaran. Setelah pengukuran kinerjanya dilakukan, diperlukan adanya evaluasi kinerja, menurut Husaian (2013; 43) evaluasi dapat didefinisikan sebagai suatu proses untuk menyediakan informasi tentang sejauh mana suatu kegiatan tertentu telah dicapai, bagaimana perbedaan pencapaian itu dengan satu standar tertentu untuk mengetahui apakah ada selisih diantara keduanya, serta bagaimana tindak lanjut atas perbedaan itu, terlihat bahwa untuk melakukan evaluasi dibutuhkan tolak ukur tertentu sebagai acuan.

Dinas Koperasi, Industri, dan Perdagangan Kabupaten Lamongan, adalah gabungan dari tiga kementerian, yaitu pada bidang Koperasi, Industri, dan Perdagangan, agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat diperlukan adanya evaluasi dengan melakukan pengukuran kinerja keuangan dan non keuangan, dengan menggunakan metode *value for money*. Seperti penulis sebelumnya (Kadafi ;2013) dengan menggunakan *value for money*, penulis dapat mengukur kinerja pada Badan Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang, hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa program yang telah dijalankan mencapai hasil yang sangat ekonomis, dan efisien, dan efektif, dan menyimpulkan program yang ditentukan oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang sudah menyentuh

ke masyarakat secara maksimal. Banyaknya komentar masyarakat sering bermunculan misalnya tentang keberhasilan dan tidak keberhasilan instansi pemerintah dalam rangka memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Sehingga antara harapan masyarakat dengan instansi pemerintah sering berbeda, artinya terjadi kesenjangan harapan yang bisa menimbulkan ketidakharmonisan antara instansi pemerintah dengan masyarakat, untuk melihat seberapa baik kinerja Dinas Koperasi, Industri dan Perdagangan kabupaten Lamongan dalam melaksanakan fungsinya sebagai organisasi sektor publik dibidang koperasi, industri, dan perdagangan, dapat diketahui dengan mengevaluasi kinerja keuangan dan non keuangan.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana penilaian kinerja keuangan dan non keuangan pada Dinas Koperasi, Industri, Dan Perdagangan di Kabupaten Lamongan ditinjau dari *value for money* ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, dapat dirumuskan tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui penilaian kinerja keuangan dan non keuangan pada Dinas Koperasi, Industri, Dan Perdagangan di Kabupaten Lamongan ditinjau dari *value for money*.

1.4 Manfaat Penelitian

Setiap penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya maupun yang secara langsung terkait di dalamnya. Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Bagi instansi terkait memberikan referensi dalam memperbaiki kinerja organisasi secara keseluruhan, dan dapat di gunakan sebagai masukan yang membangun untuk tahun berikutnya dalam mencapai tingkat output ataupun tujuan yang akan di capai pada tahun yang akan datang.
2. Bagi pembaca di harapkan dari hasil penulisan ini dapat menambah wawasan pengetahuan dalam bidang sektor publik dan dapat di jadikan bahan pertimbangan dalam mengevaluasi kinerja pada suatu perusahaan sektor publik.

1.5 Kontribusi Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh Meri (2013) dengan judul Analisis Value For Money Dan Akuntabilitas Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Pada Pdam Tirta Musi Palembang, meneliti mengenai *Value For Money* dan Akuntabilitas dapat Meningkatkan Pelayanan Publik pada Pdam Tirta Musi Palembang dengan menggunakan metode kualitatif. Penelitian selanjutnya adalah dilakukan oleh Sari (2014) dengan judul Analisis Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah Dengan Menggunakan Prinsip *Value For Money* (Study Kasus Kabupaten Sumenep Tahun 2010-2013), peneliti meneliti APBD yang merupakan suatu rencana kerja keuangan pemerintah daerah yang akan digunakan sebagai dasar untuk melakukan

pembangunan pada daerahnya. Dalam melakukan penyusunan, pembahasan, penetapan sampai pengawasan pelaksanaan anggaran tidak cukup dengan hanya melihat besar kecilnya anggaran tapi juga harus output yang dihasilkan secara ekonomis, efisien dan efektif untuk kemajuan daerah tersebut. Dalam penelitian tersebut, penulis menganalisis kinerja pemerintah daerah Kabupaten Sumenep dengan menggunakan prinsip *value for money* yang didasarkan pada tiga rasio yaitu rasio ekonomis, rasio efisiensi dan rasio efektivitas.

Persamaan dengan penulis-penulis sebelumnya adalah metode penelitian yang menggunakan metode penelitian kualitatif, sedangkan untuk perbedaannya terletak pada objek penelitian, objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Dinas Koperasi, Industri, dan Perdagangan Kabupaten Lamongan, yang merupakan gabungan dari tiga kementerian, yaitu pada bidang koperasi, industri, dan perdagangan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengukuran kinerja keuangan dan non keuangan pada Dinas Koperasi, Industri, Dan Perdagangan di Kabupaten Lamongan ditinjau dari *value for money*.